BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang esensial dalam setiap kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan bermasyarakat.[1] Dengan pengertian lain pendidikan adalah sebuah proses manusia mempelajari dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat modern. Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan masyarakat. Dengan perannya sebagai pembangun peradaban pendidikan menjadi penting untuk dikembangkan dan pahami, sehingga memiliki kekayaan paradigma dan pengertian.

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal. Dalam artian pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya. Satu diantaranya adalah dengan cara mengajarnya,, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, ditempuh juga usaha lain, yakni memberikan contoh (teladan) agar ditiru, membiasakan,

[1] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pujian dan hadiah, dan lain – lain yang tidak terbatas makalahnya. Kesimpulannya, pengajaran adalah sebagian dari usaha pendididkan.[2]

Pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai – nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.[3] Hasan Langgulung dalam sebuah kutipan sutrisno dan muhyidin mendefinisikan pendidikan ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi masyarakat dan segi individu. Dari segi masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Sementara dari segi individu, pendidikan berarti pengembangan potensi – potensi yang terpendam dan tersembunyi.[4]

Ki Hajar Dewantara dalam buku yang ditulis Abbudin Nata mendefinisikan pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan, tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam

[2] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Bandung: Rosdakarya, 2013), hal. 38.
[3] Buhkari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 29.
[4] Sutrisno & Muhyidin, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.[5]

Sementara itu Durkheim mempunyai tiga definisi tentang pendidikan seperti yang telah dikutip oleh Rakhmat Hidayat, pertama, pendidikan untuk mendapatkan peran sosial. Durkheim menjelaskan bahwa karakteristik pertama pendidikan adalah memungkinkan terjadinya kontak antara seorang individu dan masyarakat. Kontak tersebut mengakibatkan terjadinya adaptasi individu tersebut dengan lingkungan dimana dia tinggal. Dalam proses ini, individu tersebut mendapatkan peran sosial yang harus dilakukannya. Pengertian yang kedua, pendidikan sebagai sebuah metode sosialisasi orang dewasa kepada generasi muda. Definisi ketiga adalah, pendidikan sebagai metafora hypnosis. Ini adalah karakteristik pendidikan menurut Durkheim. Metafora ini beroperasi dengan kekuasaan dan otoritas. Durkheim menggunakan metafora hypnosis untuk menekankan kekuatan tindakan pendidikan. Ada dua dimensi dalam hypnosis yaitu dimensi pasif yang menunjuk pada kurangnya resistensi dari subjek terhipnosis gagasan. Seorang individu mentransmisikan gagasan tersebut kepada masyarakat. Dimensi kedua adalah otoritas yang berada di bawah kewenangan untuk menunjukan penolakanuntuk mematuhi bahkan tidak dibayangkan bahwa perbuatan

[5] Abbudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilihat saat ia menunjukan bahwa tidak bisa sebaliknya.[6]

Menurut Paolo Freire seperti yang dikutip oleh Tilaar, menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses pemerdekaan atau kesadaran akan kebebasan manusia yang memiliki potensi – potensi tertentu dalam hidupnya berhadapan dengan alam sekitarnya.[7] Pendidikan dalam pengertian ini dimaksudkan pembebasan dalam makna, pencerahan umat manusia dari ketertindasan atau secara tidak langsung berhubungan dengan perlawanan terhadap sesuatu yang membuat manusia tertindas dalam hal ini adalah kebodohan. Latar belakang pemikiran Freire dalam hal ini tidak lepas ketika terjadi penindasan terhadap petani tebu di Brazil dengan jalan pembodohan dimana banyak dari petani tersebut buta huruf, sehingga mereka menjadi buta akan realitas yang terjadi yang membuat mereka kehilangan kesadaran dalam arti kesadaran posisi mereka sebagai bagian dari realitas yang seharusnya mampu berbuat lebih untuk hidup mereka dan sadar akan ketertindasannya.

Sedikit bergeser pada masa lalu yakni pada masa Plato. Plato memahami pendidikan dengan suatu pengertian yang berbeda dengan yang lain. Menurut Plato pendidikan diartikan sebagai pendidikan untuk negara dimana negara sebagaimana yang dinyatakan dalam bukunya *The State.* Pendidikan warga negara tersebut adalah kebudayaan yang dikendalikan oleh

[6] Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 90-92.
[7] H.A.R. Tilaar, Op. Cit., hal. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara dimana negara itu sendiri dikepalai oleh seorang filsuf. Pandangan pendidikan seperti itu juga tampak pada kebudayaan Timur, seperti di China yang didpminasi oleh filsafat Konfusius ataupun di India pada masa lampau yang didominasi oleh paham Hinduisme yang mengenal kasta dalam masyarakatnya. Di Eropa, pandangan mengenai dominasi negara diganti dengan dominasi gereja pada abad pertengahan dan diperkuat oleh masyarakat feudal sampai rontoknya pada masa revolusi Perancis. Pendidikan menjadi hak asasi rakyat. Dimulailah orientasi baru dalam pendidikan yaitu yang semula berpusat pada masyarakat atau gereja, kini berpusat pada anak *(child-centered education).* Munculnya psikologi pada abad ke-19 yang melihat anak bukan sebagai orang dewasa telah melahirkan pedagogik baru yang berpusat pada anak.[8]

Paradigma tentang murid adalah anak yang belum dewasa dan masih kosong ini kemudia hari dilawan denga paradigma baru yang di usung oleh Paolo Freire. Menurut Freire, pendidikan yang membebaskan, sebaliknya, terletak pada usahanya rekonsiliasi. Pendidikan ini harus dimulai dengan pemecahan masalah kontradiksi guru – murid tersebut, dengan merujuknya kutub – kutub dalam kontradiksi itu, sehingga kedua-duannya secara bersama-sama adalah guru – murid.[9]

---

[8] *Ibid.,* hal.50-51.

[9] Paolo Freire, *Pedagogy of The Oppressed,* diterjemahkan oleh Mansour Fakih dkk dengan judul *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dengan tokoh – tokoh pendidikannya juga memiliki paradigma lain yang menjadikan keluasan kekayaan keilmuan pendidikan begitu luas dan menarik untuk didalami. Banyak tokoh – tokoh Islam dalam dunia pendidikan yang memiliki konsep tersendiri dengan karakteristik pemikiran berbeda.

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan (Islam) sebagai usaha untuk membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah berdasarkan nilai – nilai yang terkandung dalam ajaran Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran – ukuran Islam. Ukuran – ukuran Islam ditujukan pada ahlak anak didik, perilaku konkret yang member manfaat kepada kehidupannya di masyarakat.[10]

Secara lebih filosofis Muhammad Natsir dalam tulisan Ideologi Didikan Islam menyatakan, yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.[11]

Azyumardi Azra dengan beberapa kutipan menyebut pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu system keagamaan menimbulkan pengertian – pengertian baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam onteks Islam inheren dalam konotasi istilah *"tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib"* yang harus dipahami secara bersama – sama.

[10] Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 13.
[11] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga istilah ini mengandung makna amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah – istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam, informal, formal, dan non formal.[12]

Dari berbagai definisi yang disebutkan, peneliti mendefinisikan pendidikan sebagai transfer ilmu pengetahuan serta nilai budaya dari seorang guru kepada murid, dan murid kepada guru dengan bersama – sama menjadikan realitas dan nilai religiusitas sebagai dasar pengamatan, dengan tujuan tertentu.

2. Tujuan pendidikan

Berbicara tentang tujuan pendidikan tak lepas dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam UU itu dijabarkan dari UUD 1945.[13]

Ada dua tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tersirat didalam UUD 1945, yang pertama adalah pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang kedua adalah pendidikan adalah hak seluruh rakyat.[14]

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam

[12] Azyumardi Azra, *Loc., cit*.
[13] H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* hal. 5-6.
[14] H.A.R. Tilaar, *Loc., cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia modern atau hanya menjadi pekerjaan – pekerja dari industri – industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri. Inilah bangsa Indonesia yang merdeka yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bangsa yang cerdas adalah juga bangsa yang dapat memilih dari berbagai alternative yang disodorkan oleh dunia modern. Manusia Indonesia yang merdeka adalah manusia Indonesia yang dapat mewujudkan kepribadiannya atau ahlaknya atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan kebudayaan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional di dalam rangka ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka dia tidak akan hanyut dari arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan – perubahan yang besar di dalam kehidupan sehari – hari tetapi merupakan seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia serta bertanggung jawab atas kehidupannya bersama – sama dengan bangsa lain di dalam kesetaraan dan ikut menjaga perdamaian dunia.[15]

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 adalah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian keci masyarakat.[16] Dengan arti bahwa pendidikan haruslah

[15] H.A.R. Tilaar, *Loc., cit.*
[16] *Ibid.,* hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyentuh segala lapisan. Pendidikan bukan hanya dinikmati oleh masyarakat kelas tertentu, namun pendidikan harus merata seluruh daerah ditanah air. Itulah tujuan pendidikan nasional, adapun secara realitas masih banyak daerah yang belum bisa mengakses pendidikan secara baik.

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Tafsir, sekarang undang – undang itu sudah ada yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Apakah UU itu menjamin akan menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia? Petanyaan itu terjawab dalam pasal 3 UU No. 20/2003 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional… bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Pasal 4 ayat 1 juga menegaskan dalam kalimat lain, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,, dan kemajemukan bangsa." UU No. 20/2003 pasal 36 ayat (3.a) menjelaskan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa. UU No. 20/2003 pasal 37 ayat (1.a) menegaskan bahwa pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, pasal 37 ayat (2.a)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi.[17]

Berdasarkan kutipan – kutipan itu jelaslah bahwa UU No. 20/2003 telah cukup menurunkan kehendak Pancasila dan UUD 45, lebih – lebih UUD 45 pasal 31 ayat (3). Berdasarkan kutipan – kutipan itu juga jelas bahwa UU ini telah menjamin terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagaiman dituntut dalam rumusan tujuan pendidikan.[18]

Sementara itu konsep tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad At-Taumy Asy-Syaibani, adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar maupun pada proses pendidikan dan pengajaran itu sendiri sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proporsi diantara profesi asasi dalam masyarakat.[19]

Tokoh Muslim lainnya Azyumardi Azra menyebut, Pendidikan (Islam) merupakan salah – satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam, tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial – masyarakat, bangsa, dan negara, pribadi bertakwa ini dapat menjadi *rahmatan lil al-alamin*, baik dalam skala kecil maupun besar.

[17] Ahmad Tafsir, *Op. cit.,* hal. 78.
[18] *Ibid*., hal. 77-78.
[19] Bukhori Umar, *Op. cit.,* hal. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam.[20]

Selain tujuan umum itu, terdapat pula tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Tujuan khusus ini lebih *praxis* sifatnya, sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan lebih *praxis* itu dapat dirumuskan harapan yang ingin dicapai di dalam tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil yang telah dicapai.[21]

Tujuan – tujuan khusus itu adalah tahap – tahap penguasaan anak didik terhadap bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspeknya, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan, atau dengan istilah lain kognitif, afektif, dan motorik. Dan tahapan – tahapan inilah kemudian dapat dicapai tujuan – tujuan yang lebih rinci dan lengkap dengan materi, metode, dan siste evaluasi. Inilah yang kemudian disebut dengan kurikulum yang selanjutnya dirinci lagi ke dalam silabus dan berbagai materi bimbingan yang akan diberikan.[22]

Sementara itu Hasan Basri menyebut dengan beberapa kutipan, dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih tercapaianya insan yang beriman dan bertakwa. Apabila anak didik telah beriman dan

[20] Azyumardi Azra, *Op. cit.,* hal. 8.
[21] *Ibid.,* hal. 9.
[22] Azyumardi Azra, *Loc. Cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwa, artinya tujuannya telah tercapai. Beberapa indikator dari tercapainnya tujuan pendidikan (Islam) dapat dibagi menjadi tiga tujuan mendasar, yaitu:

a. Tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri – cirinya adalah memiliki tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun membantu menyelesaikan masalah orang lain yang membutuhkannya.
b. Tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan emosional, sehingga tercermin dalam kedewasaan menghadapi masalah di kehidupannya.
c. Tercapainya anak didik yang memiliki kealehan spiritual, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan rukun Islam yang lima dan mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari – hari. Misalnya, menjalankan shalat lima waktu, menjalankan ibadah puasa, menunaikan zakat karena secara ekonomi telah diwajibkan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena telah bernasib dan bernishab.[23]

Dalam kehidupan sehari – hari, indicator tercapainya tujuan pendidikan Islam adalah bergaul dengan sesama manusia dengan baik dan benar serta mengamalkan *amar ma'ruf nahyi munkar* kepada sesama manusia. Anak didik yang telah dibina dan digembleng oleh pola pendidikan Islam

[23] Hasan Basri, *Op. cit,* hal. 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah anak didik yang sukses dalam kehidupan karena ia memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan berbekal ilmu – ilmu keislaman yang di ridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.[24]

3. Fungsi pendidikan

Plato pernah merengkan bahwa, pendidikan membuat manusia menjadi baik, bertindak dengan mulia, dan menaklukkan musuh – musuh mereka dalam peperangan, karena musuh – musuhnya mereka tidak baik. Pendidikan memberikan kemenangan, meskipun kadang – kadang kemengan melupakan pendidikan. Karena kemenangan dalam perang banyak menumbuhkan keserakahan. Keserakahan itu telah menyebabkan banyak sekali kehancuran, tapi banyak sekali keserakahan seperti itu telah akan membunuh dirinya sendiri. Tetapi pendidikan tidak pernah membunuh dirinya sendiri.[25]

Dalam pengertian lain pendidikan memiliki fungsi sebagai alat negara untuk melanggengkan kekuasaan, status quo, kepentingan kekuasaan politis, dan bahkan sebagai pendukung kemajuan negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dituli Tilaar lebih lanjut bahwa, negara dalam hal ini pemerintah menempatkan pendidikan sekedar sebagai sebagai alat untuk mendukung status quo, melanggengkan kekuasaan politis.[26]

---

[24] Hasan Basri, *Loc. cit.*
[25] H.A.R. Tilaar dkk, *Pedagogik Kritis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 99.
[26] *Ibid.,* hal. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paolo Freire dalam buku politik, pendidikan menyebutkan bahwa, pendidikan dan aksi – aksi budaya yang membebaskan bukanlah proses transformasi yang mengasingkan ilmu pengetahuan, namun merupakan proses yang otentik untuk mencari ilmu pengetahuan guna memenuhi hasrat keinginan peserta didik dan guru dengan kasadaran untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.[27]

Sementara itu Choirul Mahfud, mengutip tulisan Nurkholis dalam bukunya, menyebut, pendidikan hadir ditengah – tengah masyarakat memiliki banyak fungsi yang tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa *an sich*, tetapi juga berfungsi sebagai pencerdasan diri, sosial, negara bangsa, bahkan dunia. Lebih khusus di Indonesia, fungsi pendidikan sedikit disinggung pada bab II pasal 3 dalam UU Sisdiknas 2003, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.[28]

Sebenarnya, ada beberapa fungsi pendidikan sebagaimana disinggung di atas. Setidaknya hal itu bisa dilihat dalam dua prespektif. Pertama, secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Kedua, secara makro (luas),

---

[27] Paolo Freire, *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation,* diterjemahkan oleh Agung. P. dan Fuad. A. dengan judul *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 192.

[28] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayan dan pengembangan bangsa.[29]

Azyumardi Azra berpendapat pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia merupakan karakteristik pendidikan (Islam) berikutnya. Di sini pengetahuan bukan hanya untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dengan dimikian, terdapat konsistensi antara apa – apa yang diketahui dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari – hari. Di dalam Islam, mengetahui suatu ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengamalannya secara konkret sehingga dapat terwujud kemaslahatan bagi umat.[30]

Dalam tulisan ini tersirat bahwa pendidikan menutut azyumardi berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pengimplementasiannya yang kesemuannya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Atau dapat diartikan sebagai kemakmuran masyarakat. Atau dalam wacana kebangsaan berfungsi untuk kemajuan negara bangsa.

Fungsi pendidikan (Islam) ini merupakan realisasi dari pengertian *tarbiyah al-insya'* (menumbuhkan atau mengaktualisasi potensi). Asumsi tugas ini adalah bahwa manusia manusia mempunyai sejumlah potensi atau

[29] *Ibid.,* hal. 48-49.
[30] Azyumardi Azra*, Op, cit.,* hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, sedangkan pendidikan berusaha untuk menampakan (aktualisasi) potensi – potensi tersebut yang dimiliki oleh setiap peserta didik.[31]

Fungsi pendidikan disini memiliki tiga hal penting, yang pertama, pendidikan sebagai pengembangan potensi, pendidikan sebagai pewaris budaya, dan pendidikan sebagai penghubung anatara potensi dan budaya.

B. Tinjauan Tentang Manajemen Pendidikan

1. Pengertian manajemen secara umum

Pendidikan memilki tujuan yang mulia, tujuan – tujuan itu tidak dapat datang begitu saja, tetapi harus melalui usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu butuh manajemen dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu perlu diketahui dahulu istilah dan pengertian manajemen secara umum sebelum masuk kepada manajemen pendidikan.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, karena manajemen pasti berhubungan dengan organisasi makan manajemen memiliki 6 unsur, yaitu, *man, money, method, machines, materials, dan market.*

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip pada buku Erni dan kurniawan, mendefinisikan manajemen adalah seni dalam meneyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things done through people.*[32]

---

[31] Bukhari Umar, *Op, cit.,* hal. 69.
[32] Erni dan Kurniawan, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erni dan Kurniawan kemudian memberikan pengertian bahwa manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.[33] Dari pengertian Erni dan Kurniawan dapat diketahui bahwa menurut pandangan mereka manajemen diartikan sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Malayu Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[34]

Sementara itu dalam buku Manajemen Pendidikan, yang ditulis tim dosen administrasi pendidikan UPI, memaparkan ddefinisi pendidikan menurut beberapa ahli.

a. *Encyclopedia of social sciences, management may be defined as the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised.*
b. Rue dan Byars, *management is a process that invalesguiding or directional group of people toward organizational goals or objectivitas.*
c. Hersey dan Blanchard, manajemen merupakan proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan.
d. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi, dan

[33] Erni dan Kurniawan, *Loc. Cit.*
[34] Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan sumber daya organisasi lainnyaagar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

e. Millet, *management is the process of directing and facilitating in the work of people organization in formal group to achiev a desired goal.*

f. Balderton, *management is stimulating, and directing of human effort to utilize effectively materials and facilities to attain an objective.*

g. Terry, *Management is getting things done through the effort of other people.*

h. Blanchard, *Management as working with and through individuals and growth to accomplish organizational goals.*

i. Sudjana, manajemen merupakan suatu rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma – norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya memiliki hubungan dan saling daqn saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.[35]

2. Fungsi manajemen secara umum

Fungsi – fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing – masing dan mengikuti satu tahapan – tahapan tertentu dalam pelaksanaanya. [36] Lebih

[35] Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 86-87.
[36] Erni dan Kurniawan, *Op. cit.,* hal. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut Erni dan Kurniawan mengutip Nikels, McHugh and McHugh, terdiri dari empat fungsi yaitu,

a. Perencanaan atau *planning,* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
b. Pengorganisasian atau *organizing,* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
c. Pengimplementasian atau *directing,* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
d. Pengendalian dan pengawasan atau *controlling,* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.[37]

Beberapa ilmuan memiliki pengertian dan klasifikasi berbeda tentang fungsi manajemen. Sesuai dengan pernyataan Malayu Hasibuan, fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan para penulis tidak sama, tergantung pada sudut pendekatan dan pandangan mereka.[38]

Perbedaan ini terjadi karena perpbedaan paradigm yang disebabkan berbagai faktor. Namun pada intinya perbedaan ini sebetulnya tidak jauh berbeda. Hal ini menjadi kekayaan wacana dalam keilmuan manajemen sendiri.

Agar lebih jelasnya dapat dilihat table 1.1 yang akan menggambarkan peta fungsi – fungsi manajemen sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli di dunia dan Indonesia.

Tabel 2.1

Fungsi – fungsi manajemen

G.R. Terry	**John F. Mee**	**Louis A. Allen**	**MC. Namara**
1. *Planning* 2. *Organizing* 3. *Actuating* 4. *Controlling*	1. *Planning* 2. *Organizing* 3. *Motivating* 4. *Controlling*	1. *Leading* 2. *Planning* 3. *Organizing* 4. *controling*	1. *Planning* 2. *Programing* 3. *Budgeting* 4. *System*
Henry Fayol	**Harold K.**	**P. Siagian**	**Oey Liang Lee**
1. *Planning* 2. *Organizing*	1. *Planning* 2. *Organizing*	1. *Planning* 2. *Organizing*	1. *Perencanaan* 2. *Pengorganisasian*

[37] Erni dan Kurniawan, *Loc., cit.*
[38] Malayu Hasibuan, *Op. cit.,* hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Commanding* 4. *Coordinating* 5. *Controling*	3. *Staffing* 4. *Directing* 5. *Controlling*	3. *Motivating* 4. *Controlling* 5. *Evaluation*	3. *Pengarahan* 4. *Pengkoordinasian* 5. *Pengontrolan*
W.H. Newman	**Luther Gullick**	**Lyndall F.**	**John. D. Millet**
1. *Planning* 2. *Organizing* 3. *Assembling resource* 4. *Directing* 5. *Controlling*	1. *Planning* 2. *Organizing* 3. *Staffing* 4. *Directing* 5. *Coordinating* 6. *Reporting* 7. *Budgeting*	1. *Forecasting* 2. *Planning* 3. *Organizing* 4. *Commanding* 5. *Coordinating* 6. *Controlling*	1. *Directing* 2. *Facilitating*

Tabel fungsi manajemen[39]

3. Pengertian manajemen pendidikan

Secara sederhana manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif.[40] Tujuan pendidikan akan tercapai jika pendidikan dikelola dengan baik dan bijaksana. Melihat tujuan pendidikan maka tak lepas dari pengertian pendidikan itu sendiri, Pendidikan adalah upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mempu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia.[41] Maka untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang maju.

Sementara itu dalam prespektif pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam suatu proses pengelolaan pendidikan Islam secara Islami

[39] Malayu Hasibuan, *Op. cit.,* hal. 3.
[40] Tim Dosen UPI, *Op. cit.,* hal. 87.
[41] Udin dan Abin, *Perencanaan Pendidikan,* (Bandung: Rosdakarya, 2011), hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyiasati sumber – sumber belajar dan hal – hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.[42]

4. Tujuan manajemen pendidikan

Tujuan manajemen pendidikan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien.[43]

Berbicara tentang tujuan pendidikan maka juga akan bicara tujuan manajemen pendidikan nasional yang tak lepas dari tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.[44]

Dalam *stakeholders society* di mana masyarakat merupakan salah satu pemegang hak maka tujuan lembaga – lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat dan bukan hanya menampungyang diinginkan oleh birokrasi. Dalam kaitan ini, perlu ada ada lembaga atau struktur organisasi di lembaga – lembaga pendidikan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam memberikan investasi dalam pendidikan berupa SPP pajak, dan sebagainya, melainkan juga ikut serta dalam merencanakan kurikulum pendidikan, evaluasi penidikan, dan hal – hal yang menyangkut proses belajar. Dengan demikian, tujuan manajemen yang menampuang semua unsur pemilik

[42] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 10.
[43] Tim Dosen UPI, *Op. cit.,* hal. 88.
[44] Udin dan Abin, *Op. cit.,* hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan itu harus dapat dirumuskan dengan baik agar tujuan pendidikan, yaitu kualitas pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Manajemen pendidikan tidak lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu pendidikan yang mempunyai relevansi dan akuntabilitas. Relevansi pendidikan hanya dapat dicapai apabila masyarakat sendiri ikut sertadalam proses pelaksanaan, visi, misi, dan kebutuhan masyarakat pemiliknya. Demikian pula, lembaga pendidikan memiliki kualitas yang tinggi apabila mempunyai akuntabilitas terhadap masyarakatnya. Hal ini berarti semua program yang ada di lembaga pendidikan akuntabel terhadap pemiliknya. Semua hal itu dapat dilaksanakan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat *(community based education)*. Dalam manajemen pendidikan berbasis sekolah harus mengikutsertakan semua semua *stakeholder* dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, dalam pendidikan berbasis masyarakat, semua *stakeholder* di masyarakat harus ikut serta dalam penyelenggaraan aspek – aspek manajemennya.[45]

C. Tinjauan Tentang Multikultural

Secara etimologis multikultural terdiri dari dua suku kata yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Oleh karena itu sebelum membahas multikultural secara luas maka akan dibahas tentang kultur atau budaya.

[45] H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* hal. 292-293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kultur (budaya)**

Kata dasar kebudayaan adalah budaya. Secara umum sudah biasa disebutkan bahwa kebudayaan dipandang berasal dari bahasa sanksekerta *buddhayah,* yang diartikan sebagai bentuk jamak dari konsep *budhi* dan *dhaya* (akal).[46] Atau dapat disebut akal budi.

Budaya adalah segala hasil pikiran, perasaan, kemauan, dan karya manusia secara individual atau kelompok untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat.[47]

Kebudayaan adalah sebuah kategori yang deskriptif dan konkret, kebudayaan dipandang sebagai sekumpulan besar karya seni dan karya intelektual di dalam suatu masyarakat tertentu, ini adalah penggunaan bahasa sehari – hari untuk istilah "kebudayaaan" dan didalamnya tercakup pengertian – pengertian tentang partikularitas, eksklusivitas, pelatihan, dan pengetahuan khusus atau sosialisasi. Ia mencakup sebuah pandangan yang sangat mapan tentang kebudayaan sebagai ranah simbolik yang sengaja diproduksi dan kemudian mengendap, meskipun simbolismu itu bersifat esoterik.[48]

Menurut Taylor yang dikutip oleh Haedar Nashir, mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,

---

[46] Ade Putra dkk, *Korelasi Kebudayaan & Pendidikan,* (Jakarta: Pustaka Obor, 2014), hal. 5.
[47] Yaya dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural,* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 84.
[48] Chris Jenks, *Culture,* diterjemahkan oleh Erika Setyawati dengan judul *Culture: Studi Kebudayaan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan – kemampuan lainnya serta kebiasaan – kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota dari masyarakat.[49]

2. Multikultural (isme)

Multikultural (isme) adalah gagasan yang lahir dari fakta tentang perbedaan antar warga masyarakat bersumber etnisitas bersama kelahiran sejarah. Pengalaman hidup yang berbeda menumbuhkan kesadaran dan tata nilai yang berbeda yang kadang tampil secara bertentangan. Perjumpaan manusia berlatarbelakang etnis berbeda semakin hari semakin meluas melintasi batas teritori bangsa dan negara hingga batasan benua, menumbuhkan kesadaran atas fakta *otherness* (liyan/ lain) yang disandang setiap etnis dan bangsa – bangsa di dunia. Sebagian diantara perbedaan tersebut berupa warna kulit, postur tubuh, selain bahasa, tradisi, pandangan hidup, kepemelukan, dan paham agama.[50]

Sementara menurut Nur Syam, keyakinan atau pemahaman bahwa dalam tiap kehidupan masyarakat memiliki berbagai macam kebudayaan disebut dengan multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat ketika sebuah entitas masyarakat tertentu diamati, maka akan Nampak berbagai bentuk perbedaan tingkah laku budaya yang berasal dari kultur etnis dalam entitas tersebut. Kebudayaan tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan aktivitas sosial,

[49] Haedar Nashir, *Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya,* (Yogyakarta: Multi Presindo, 2013), hal. 32.
[50] Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural,* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspresi diri, dan penguatan solidaritas kolektif, namun juga digunakan untuk melakukan dialog antara satu etnis dengan etnis lainnya dalam sebuah entitas. Hubungan antar budaya dari berbagai etnis tersebut didasari oleh pengetahuan budaya dan symbol – symbol budaya yang terkait dengannya.[51]

Multikulturalisme adalah seperangkat idea tau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah adanya kesetaraan budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya tidaklah berada di dalam suasana bertanding untuk memenangkan pertarungan.[52]

Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, dan etnis seluruh konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya – budaya yang beragam (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa kelompok – kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.[53]

Ketika konsep multikulturalisme menjadi satu kesepahaman bersama, maka tata cara dan perilaku actor dalam suatu seting budaya tertentu tidak

[51] Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2008). Hal. 68-69.
[52] *Ibid.,* hal. 79.
[53] Ngainun dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan bersikukuh pada budayanya masing – masing. Bahkan secara consensus dapat diakui ketika peneguhan dan penegasan identitas diri atau kelompok, utamanya lagi identitas kelompok keagamaan, akan terbangun fondasi yang kokoh dan tidak tergoyahkan dengan cara apapun. Bahkan kalau perlu dengan segala cara yang dianggap wajar dan masih dalam batas – batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Pertanggung jawaban secara sosial akan terwujud manakala hakikat peneguhan jati diri tidak menimbulkan ekses bagi kelompok lain yaitu berubah dan berkembang menjadi sesuatu yang tidak wajar, tidak nyaman dan mengarah kepada sesuatu yang lebih destruktif dan membahayakan kehidupan bersama umat manusia.[54]

Dapat disimpulkan jika multikultural adalah sebuah kondisi keberagaman yang terdiri dari berbagai budaya, etnis, dan agama. Multikulturalisme adalah paham yang megakui perbedaan, menerima keberagaman dan tidak merasa lebih besar dan menganggap yang lain kecil. Suatu paham tentang hidup bersama dalam perbedaan. Bhineka Tunggal Eka.

D. Tinjauan Teoritis Tentang Manajemen Pendidikan Multikultural dan Implementasinya.

1. Pengertian pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian bukan

[54] Sulalah, *Pendidikan Multikultural,* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya sama dengan definisi pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan pakar yang lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural.[55]

Pendidikan multikultural merupakan wacana lintas batas. Dalam pendidikan multikultural terkait masalah – maslah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak mengherankan apabila pendidikan multikultural berkaitan dengan isu – isu politik, sosial, kultural, moral, edukasional, dan agama. Tanpa kajian bidang – bidang ini maka sulit untuk diperoleh suatu pengertian mengenai pendidikan multikultural.[56]

Sementara itu yaya suryana dan rusiana menuliskan beberapa definisi dari para ahli . pendapat itu akan peneliti sajikan sebagai berikut:

a. Andersen dan Cusher, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman budaya.
b. James Banks, mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya, dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok ataupun negara.

[55] Choirul Mahfud, *Op. cit.,* hal. 175.
[56] H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* hal. 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Paolo Freire, mendefinisikan pendidikan bukan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya.

d. Azra, menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, serta subjek – subjek lain yang relevan.

e. Howard berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetnsi multikultural. Pada mas awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturnya masing – masing. Melalui pendidikan multikultural sejak dini anak diharapkan mampu menerima dan memahami perbedaan budaya.[57]

2. Globalisasi dan urgensi pendidikan multikultural

a. Globalisasi

Saat ini, dalam kehidupan kerja maupun di waktu senggang sehari – hari, sepertinya tak seorangpun yang lolos dari berbagai segi globalisasi. Istilah yang sangat umum ini sesungguhnya memperlihatkan suatu kapasistas untuk menunjukan dialaminya "perluasan dan intensifikasi

[57] Yaya dan Rusdiana, *Op. cit.,* hal. 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relasi – relasi sosial pada tingkatan dunia" (Antony Giddens) yang universal dan terus – menerus berubah.[58]

Proses globalisasi ada sejak manusia memasuki masa sejarah, ketika tersusunnya sistem politik, ekonomi, agama, teknik, dan budaya supralokal mengakibatkan serangkaian penyingkapan sekat – sekat. Awal mula dinamika globalisasi pertama yang disebut yang disebut sebagai globalisasi kuno ini ditandai , yakni sejak zaman perunggu, mulai tahun 4000 SM hingga awal abad XVII.[59]

Sementara itu H.A.R. Tilaar menyebut globalisasi memiliki dampak negatif, dia menyebut, globalisasi ternyata menimbulkan berbagai hubungan baru dalam kerja sama antar bangsa dan bukannya menimbulkan masalah – masalah besar. Masalah – masalah globalisasi yang timbul antara lain, memerlukan suatu tatanan baru pergaulan manusia. *A New World Order* ternyata diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Dampak tersebut antara lain kerusakan lingkungan karena karena permintaan bahan baku dari negara – negara industry yang kebanyakan mempengaruhi atau merusak lingkungan negara – negara yang sedang berkembang.[60]

---

[58] Francois Chaubet, *Que Sais-je? La Mondialisation Culturelle,* diterjemahkan oleh Feybe I. Mokoginta dengan judul *Globalisasi Budaya,* (Yogyakarta: Jalasutra, 2015), hal. Vii.
[59] *Ibid.,* hal. 1.
[60] H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* hal. 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah lain yang tak kalah besar adalah terbentuknya masyarakat serba nilai, yaitu berkembangnya nilai – nilai budaya masyarakat yang timbul akibat modernisasi itu sendiri. Beberapa kecenderungan tersebut anatara lain sekulerisme, materialisme, individualisme, hedonisme, dan sebagainya.

Dengan adanya nilai dan cara pandang baru apalagi dengan era IT dan industrialisasi maka perubaahan nilai pada budaya masyarakat akan berubah dengan cepat bila tanpa adanya kontrol. Bisa jadi identitas bangsa khususnya Indonesia akan luntur dengan sendirinya, padahal itulah kearifan dan kekayaan bangsa ini.

b. Urgensi pendidikan multikultural

Berbicara masalah pentingnya maka aka nada beberapa hal penting yang menjadi alasan adanya pendidikan multikultural. Menurut yaya dan rusdiana ada tiga hal penting yang mendasari urgensi pendidikan multikultural.

Pertama, masa depan memerlukan krativitas, adalah masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peran penting untuk memicu kreativitas. Perubahan keadaan yang nonlinier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier.

Kedua, munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial, maksudnya adalah bangsa seperti Indonesia dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesifitas sosial masyarakat. Maka pendidikan multikultural menjadi penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena fungsi pendidikan multikultural sebagai alternative pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain itu, pendidikan multikultural sangat relevan dipraktikkan dalam demokrasi seperti saat ini.

Ketiga, spectrum kultur masyarakat Indonesia merupakan tantangan, dalam artian spectrum kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah ragam perbedan tersebut dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Pada era globalisasi ini pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk kedalam negeri. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Hal ini disebabkan pertemuan antar budaya pada era globalisasi ini dapat menjadi ancaman serius bagi siswa. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.[61]

3. Manajemen pendidikan multikultural (implementasi dalam pendidikan nasional)

Setelah mengetahui urgensi dan mendesaknya maka perlu untuk segera diterapkan pendidikan multikultural, dengan pengelolaan atau manajemen yang baik dan tersistemik.

a. Penyajian pendidikan multikultural

Yang terinci sebagai berikut,

1) *Planning* atau perencanaan pendidikan multikultural

Perencanaan pendidikan adalah suatu proses intektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan dan menimbang serta serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi internal dan berhubungan secara sistematis dengan keputusan – keputusan lain, baik dalam bidang – bidang itu sendiri maupun dalam bidang – bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain.[62]

Dalam hal ini pendidikan multikultural harus melalui tahap ini, yaitu proses intelektual, yang berkesinambungan untuk merumuskan,

[61] Yaya dan Rusdiana, *Op. cit.,* hal. 255-256.
[62] Udin dan Abin, *Op. Cit.,* hal.12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memutuskan yang akan diambil, baik dalam Dinas Pendidikan Pusat maupun Daerah.

Dunia pendidikan menjadi kembali hidup, kesadaran multikultural mulai tumbuh hal ini terbukti dari lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemberian kewenangan dan keleluasaan pada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. UU No. 22 tahun 1999, selanjutnya diubah dengan UU No. 32 tahun 2004, yaitu undang – undang otonomi daerah yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 yaitu adanya pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan kecuali, agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fisikal.[63]

Dengan adanya undang – undang ini maka sekolah sebagai satuan pendidikan di daerah dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar dapat dengan mandiri merumuskan kebijakan dalam pendidikan yang ada pada sekolah di daerah tersebut untuk mengembangkan budaya dan potensi daerah yang ada.

2) *Organizing* atau pengorganisasian manajemen pendidikan multikultural

[63] Sri Minarti, *Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hal. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.[64]

Artinya pendidikan multikultural dalam proses pengorganisasian harus membuat struktur yang tepat kepada orang yang tepat yang melibatkan semua pihak yang terkait. Serta memberikan porsi pengawasan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

3) *Actuating* atau pelaksanaan manajemen pendidikan multikultural

Mungkin timbul pertanyaan pada kita apakah pelaksanaan pendidikan multikultural disajikan sebagai mata pelajaran ataukah merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang terintegrasi. Pendidikan multikultural sebaiknya tidak diberikan sebagai dalam satu mata pelajaran yang terpisah, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran – mata pelajaran yang relevan. Dalam mata pelajaran ilmu – ilmu sosial, dan mata pelajaran bahasa, tujuan yang telah dirumuskan mengenai pendidikan multikultural dapat dicapai tanpa memberikan suatu mata pelajaran tertentu. Dalam mata pelajaran kewarganegaraan ataupun

[64] Erni dan Kurniawan, *Op. cit.,* hal. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan moral merupakan wadah untuk menampung program – program pendidikan multikultural.[65]

Selain membicarakan pendidikan multikultural dalam bentuk penyajiannya kurikulum dapat pula disajikan dalam pengertian pendidikan yang lebih luas, yaitu dalam seluruh budaya lembaga pendidikan, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat luas.[66] Dengan demikian pendidikan multikultural menjadi jiwa dalam setiap lembaga pendidikan di tanah air, yang akan terus mengawal pendidikan.

4) *Controlling* atau pengendalian manajemen pendidikan multikultural

Proses pengendalian adalah bagaimana tujuan yang telah disusun dalam perencaan, dan kegiatan yang telah dirumuskan serta kebijakan yang terbentuk dapat berjalan dan terkendali dengan baik. Dalam dal ini penerapan manajemen pendidikan multikultural haruslah sesuai dengan perencanaan dalam artian penyesuaian dan pengendalian itu dilaksanakan oleh sekolah dan masyarakat serta pemerintah daerah ditempat.

Dalam UU. No. 20 Tahun 2003 dikemukakan perlu adanya Dewan Pendidikan baik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan tersebut merupakan lembaga yang independen

[65] H.A.R. Tilaar, *Op. cit.,* hal. 218.
[66] H.A.R Tilaar, *Loc., cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang antara lain dapat mengontrol jalannya pendidikan di daerah. Sayang sekali sampai dewasa ini Dewan Pendidikan belum banyak terdengar sehingga masih sulit untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pendidikan di daerah.[67]

b. Desentralisasi pendidikan sebagai kebangkitan pendidikan multikultural

Hancurnya orde baru dengan adanya reformasi 1998, menjadi tititk awal dunia baru bagi Indonesia. Dunia pendidikan menjadi kembali hidup, kesadaran multikultural mulai tumbuh hal ini terbukti dari lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemberian kewenangan dan keleluasaan pada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. UU No. 22 tahun 1999, selanjutnya diubah dengan UU No. 32 tahun 2004, yaitu undang – undang otonomi daerah yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 yaitu adanya pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan kecuali, agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fisikal.[68]

Dalam era otonomi daerah telah tercermin kesadaran tentang kekayaan budaya Indonesia yang begitu besar yang seharusnya menjadi kapita budaya bukan untuk di hancurkan dan diseragamkan. Otonomi

[67] *Ibid.,* hal. 22.
[68] Sri Minat. *Loc. Cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah berhak untuk turut membangun pendidikan di daerahnya sekolah juga berhak mengatur pengelolaanya, sesuai dengan potensi daerah masing – masing.

c. Karakter unggul pendidikan multikultural

Karakter yang ditanamankan dalam pendidikan multikultural adalah karakter luhur, yang mengerti nilai – nilai luhur kebudayaan. Nilai – nilai sebagai suatu yang berharga dan norma – norma sebagai patokan berperilaku dalam kehidupan seseorang atau sekelompok orang akan terus diserap melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara terus menerus. Di sinilah pentingnya pendidikan sebagai pranata kebudayaan untuk menanamkan dan membiasakan nilai – nilai dalam kehidupan manusia menuju kehidupan yang berbudi utama atau berkeadaban selaku mahluk Tuhan Yang Mulia. Nilai dasar kehidupan itu adalah pandangan hidup, iman dan takwa, serta nilai perilaku jujur, berani, amanah, adil, bijaksana, tanggug jawab, disiplin, mandiri, malu, kasih sayang, indah, toleran, dan cinta bangsa.[69]

[69] Haedar Nashir, *Op. cit.,* hal 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id